

Joha Berharap Dana Hibah Parpol Ditingkatkan



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Selasa,09/07/2024

SEJUMLAH Partai Politik (Parpol) di Kota Samarinda menerima bantuan dana dari pemerintah untuk kegiatan partai, baik dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan maupun operasional sekretariat. Penyerahan dana tersebut diberikan di Senyuir *Ball Room* Lantai II Hotel Bumi Senyuir Samarinda, dipimpin oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun.

Dalam proses penyaluran bantuan keuangan partai politik tersebut, terdapat 10 partai di Kota Samarinda dalam masa bakti 2019-2024 yang mendapatkan bantuan keuangan tahun 2024 ini. Terhitung mulai Januari hingga Agustus 2024, dengan jumlah besaran secara keseluruhan Rp1,39 miliar. Kegiatan anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda Tahun 2024.

Sepuluh partai tersebut di antaranya yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Samarinda, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Samarinda, Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Samarinda, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Samarinda, Partai Nasional Demokrasi (NasDem) Kota Samarinda, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Samarinda, Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Samarinda, Partai Demokrat Kota Samarinda, dan terakhir Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Samarinda.

Ketua DPD Partai Nasdem Kota Samarinda, Joha Fajal, mengatakan bahwa di tahun ini, pihaknya mendapatkan dana hibah sebesar Rp138,6 juta. Dana tersebut dipastikan dipergunakan sebaik-baiknya, lantaran sesuai dengan yang disampaikan Wali Kota Samarinda Andi Harun bahwa dana tersebut setidaknya dapat dialokasikan sedikitnya 60 persen untuk pendidikan Parpol, sementara sisanya untuk kegiatan kesekretariatan. “Jadi kalau kaitannya dengan cukup atau tidaknya ya lebih dari cukup,” ungkapnya.

Hal ini, tambah Joha, juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

“Kita harus menggunakan semaksimal mungkin agar bisa melaksanakan kegiatan di partai, ” ujar Joha.

Ia juga berharap ke depan, pembiayaan untuk Parpol bisa lebih ditingkatkan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Sebab menurut Joha yang juga selaku Ketua Komisi I DPRD Samarinda ini, peningkatan pembiayaan Parpol penting untuk membantu Parpol dalam menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi. Dengan dana yang lebih besar, Parpol diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan politik dan memperkuat peran mereka dalam masyarakat.

“Kita bersyukur kalau Wali Kota sudah memperhatikan seperti itu, dan harapannya ke depannya pembiayaan bisa lebih besar lagi,” pungkas Joha. **(Advertorial/adv)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Joha Berharap Dana Hibah Parpol Ditingkatkan, 09/07/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (PP 5/2009) bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dalam Pasal 1 angka 2 PP 5/2009 dijelaskan bahwa bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
3. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PP 5/2009, besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.